



Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan

Khairunnisa Febrianti Ariani

Universitas Negeri Semarang

Tia Indah Rahmawati

Universitas Negeri Semarang

Dini Vriska Anggraini

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang

Jawa Tengah-Indonesia 50229

Korespondensi penulis: khairunnisaariani48532@gmail.com

Abstrak. *Improving financial literacy among rural communities plays a significant role in supporting financial inclusion and economic growth in Indonesia. Financial literacy, encompassing financial understanding, skills, attitudes, and behaviors, is a vital element in helping individuals make wise financial decisions and enhance economic well-being. This study analyzes the relationship between financial literacy and financial inclusion from the perspective of banking law, focusing on the role of regulations and the challenges faced by rural communities. Data were obtained through literature reviews and related policy analyses. The findings reveal that low financial literacy in rural areas is influenced by limited access to infrastructure, education, and financial information. Strategic solutions involve sustainable educational programs, the use of digital technology, infrastructure strengthening, and culturally adapted approaches. With improved financial literacy, access to financial services is expected to become more inclusive, supporting the stability of the national financial system and fostering equitable prosperity across various societal layers.*

Keywords: *Banking Law ; Financial Inclusion ; Financial Literacy ; Rural Communities*

Abstrak. Peningkatan literasi keuangan masyarakat pedesaan memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Literasi keuangan, yang mencakup pemahaman, keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan, menjadi elemen vital dalam membantu individu membuat keputusan keuangan yang bijak dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam perspektif hukum perbankan, dengan fokus pada peran regulasi serta tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan. Data diperoleh melalui kajian literatur dan analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah di pedesaan dipengaruhi oleh keterbatasan akses infrastruktur, pendidikan, dan informasi keuangan serta budaya dan pola pikir tradisional. Solusi strategis melibatkan program edukasi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, penguatan infrastruktur, serta adaptasi pendekatan berbasis budaya lokal. Dengan peningkatan literasi keuangan, diharapkan akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih inklusif, mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, dan menciptakan kesejahteraan yang merata di berbagai lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Perbankan ; Inklusi Keuangan ; Literasi Keuangan ; Masyarakat Pedesaan*

PENDAHULUAN

Literasi keuangan adalah gabungan antara kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan seseorang untuk membuat keputusan keuangan yang bijak demi mencapai kesejahteraan finansial pribadi. Melalui literasi keuangan, pemberdayaan konsumen diharapkan mampu mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Pemahaman masyarakat mengenai literasi

keuangan sudah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Remund menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah ukuran sejauh mana seseorang memahami konsep-konsep keuangan, serta memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk mengelola keuangan pribadi. Literasi ini mencakup kemampuan mengambil keputusan keuangan yang tepat dalam jangka pendek, merancang perencanaan keuangan jangka panjang, dan mempertimbangkan situasi serta kondisi ekonomi yang ada. Oleh karena itu, literasi keuangan perlu dikembangkan sebagai kemampuan dasar bertahan hidup yang wajib dimiliki setiap individu untuk menjalani kehidupan secara berkelanjutan.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, literasi keuangan telah menjadi lebih kompleks dengan munculnya berbagai produk keuangan baru. Pemahaman dasar tentang literasi keuangan kini menjadi kebutuhan penting agar individu dapat mengevaluasi risiko dan manfaat dari produk-produk tersebut. Mereka yang memiliki literasi keuangan dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara efisien. Literasi keuangan juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan suatu negara. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu, dan variasi produk keuangan, kemampuan literasi keuangan sangat penting bagi individu untuk mengelola keuangan pribadinya secara efektif.² Pemahaman keuangan yang baik sangat penting bagi individu untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan finansial. Kekurangan pengetahuan di bidang keuangan dapat menimbulkan kerugian, baik yang disebabkan oleh inflasi, penurunan kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional, maupun akibat perkembangan sistem keuangan yang semakin rumit.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan merujuk pada aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas mereka, guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.³ Pemerintah, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), berharap lembaga perbankan tetap berfokus pada tujuan utamanya, yaitu menjangkau lebih banyak masyarakat sebagai bagian dari implementasi inklusi keuangan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, meskipun digitalisasi perbankan menawarkan berbagai kemudahan, risiko yang terkait juga semakin meningkat, termasuk risiko operasional, strategi, dan reputasi.⁴ Peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat pedesaan menjadi langkah strategis untuk mendorong inklusi keuangan, yang merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Inklusi keuangan, yang merujuk pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sangat penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, literasi keuangan tidak hanya sekedar pemahaman tentang produk keuangan, tetapi juga kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak dan sesuai dengan kondisi ekonomi pribadi.

¹ Margaretha, F., & Pambudhi, R. A. (2015). Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S-1 fakultas ekonomi. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 17(1), 76-85.

² Sugiharti, H., & Maula, K. A. (2019). Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2).

³ Wulandari, R. (2019). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Provinsi DKI Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta).

⁴ Setyaningrat, D., Mushlihah, I. A., & Zunaidi, A. (2023). Strategi digitalisasi untuk mendorong inklusi keuangan nasabah bank syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 53-76.

Inklusi keuangan merujuk pada akses dan penggunaan layanan keuangan yang memadai oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di pedesaan. Pedesaan seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan keuangan tradisional. Keterbatasan jaringan perbankan dan lembaga keuangan, ditambah dengan minimnya infrastruktur, membuat masyarakat pedesaan kesulitan dalam memperoleh layanan keuangan yang mereka perlukan. Inklusi keuangan di pedesaan dapat menjadi pendorong penting bagi kemajuan ekonomi lokal. Dengan menyediakan akses ke layanan perbankan, pinjaman, dan produk keuangan lainnya, masyarakat pedesaan dapat lebih mudah mengembangkan usaha mikro dan kecil, meningkatkan hasil pertanian, serta memperluas sumber pendapatan mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan inklusi keuangan adalah dengan memanfaatkan teknologi finansial.⁵ Peran hukum perbankan dalam memperkuat literasi keuangan di pedesaan sangat penting. Melalui regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan kebijakan terkait literasi keuangan, sektor perbankan dapat berkontribusi secara aktif dalam memberikan akses, edukasi, dan layanan keuangan yang mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan di daerah pedesaan diharapkan dapat mendorong tercapainya tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi di Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan masyarakat dalam mendorong inklusi keuangan Indonesia?
2. Bagaimana Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan guna mendorong Tingkat inklusi keuangan Indonesia dalam perspektif hukum perbankan?

KAJIAN TEORI

1. Teori Literasi Keuangan

Istilah literasi keuangan pertama kali muncul pada tahun 1787 di Amerika Serikat. Dalam sebuah surat kepada Thomas Jefferson, John Adams menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mengatasi kebingungan dan tekanan yang meluas di Amerika akibat kurangnya pemahaman tentang kredit, peredaran uang, dan karakteristik koin. Kemampuan mengelola keuangan pribadi secara efektif saat ini menjadi hal yang sangat penting, mencakup semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan dan latar belakang. Chen dan Volpe (1998) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk mengelola keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan di masa depan. Literasi keuangan tidak hanya mencakup pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, tetapi juga tercermin dalam perilaku individu yang berupaya meningkatkan pemahaman dan penerapan literasi keuangan.⁶

2. Teori Inklusi Keuangan

Menurut Joshi (2011), inklusi keuangan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan bagi kelompok rentan, seperti individu dari golongan berpenghasilan rendah, dengan biaya terjangkau serta

⁵ Asir, M., Wahab, A., Firdaus, A., Suprpto, S., & Azizi, M. (2023). OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI FINANSIAL UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI PEDESAAN. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11633-11637.

⁶ Latifiana, D. (2017, April). Studi literasi keuangan pengelola usaha kecil menengah (UKM). In *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* (Vol. 3, No. 1).

dalam kondisi yang adil dan transparan yang disediakan oleh pelaku industri keuangan. Sementara itu, FATF (2011) mencatat bahwa meskipun terdapat kesepakatan yang berkembang mengenai pentingnya inklusi keuangan, tidak ada kesepakatan serupa terkait definisinya. Definisi inklusi keuangan dapat berbeda secara signifikan tergantung pada konteks nasional dan tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peningkatan literasi keuangan masyarakat pedesaan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia melalui perspektif hukum perbankan. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi teori-teori literasi keuangan, kebijakan inklusi keuangan yang diterapkan di Indonesia, serta peran hukum perbankan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat pedesaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam mengakses layanan keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi Keuangan Masyarakat dalam Mendorong Inklusi Keuangan Indonesia

Literasi keuangan merujuk pada kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif. Literasi keuangan berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang kurang baik. Faktor-faktor seperti perilaku, budaya, dan pengaruh eksternal memiliki hubungan yang signifikan dengan literasi keuangan. Pendidikan keuangan dianggap sebagai elemen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan literasi keuangan, yaitu tingkat literasi tinggi, literasi rendah, literasi sedang, dan tidak memiliki literasi. Tingkat literasi tinggi mencakup individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang produk dan layanan keuangan serta kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif. Pada tingkat literasi menengah, individu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lembaga keuangan serta produk dan layanan yang ditawarkan, namun mereka belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan hal tersebut. Sementara itu, tingkat literasi rendah mencakup individu yang baru mulai mengenal lembaga keuangan dan produk serta layanan yang tersedia pada tahap dasar, tetapi belum mengetahui manfaat atau risikonya. Adapun individu yang berada pada kategori tidak memiliki literasi adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang lembaga, produk, atau layanan keuangan. OJK mengharapkan keterampilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas sehingga dapat mendorong inklusi keuangan secara signifikan dan menyeluruh.⁸

Inklusi keuangan mengacu pada penyediaan akses terhadap layanan keuangan yang memadai, aman, nyaman, dan terjangkau, khususnya bagi kelompok rentan atau kurang

⁷ Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). Memahami Inklusi Keuangan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Anggota IKAPI 077/DIY/2012.

⁸ Nurjannah, S. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, SIKAP KEUANGAN DAN PERILAKU KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI JAKARTA BARAT: MODEL KONSEPTUAL.

beruntung. Kelompok ini mencakup individu berpenghasilan rendah, penduduk yang tidak tercatat, serta mereka yang tinggal di kawasan pedesaan yang sebelumnya kurang atau tidak terlayani oleh sektor keuangan formal. Selain itu, inklusi keuangan juga mencakup perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi individu yang saat ini hanya memiliki akses ke produk keuangan dasar. Secara lebih luas, inklusi keuangan dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa keuangan tersedia dengan biaya yang terjangkau dalam lingkungan yang adil. Strategi inklusi keuangan telah dikembangkan di berbagai negara dan dipublikasi sebagai dokumen resmi. Proses penyusunannya melibatkan konsultasi antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Kepemimpinan dalam penyusunan strategi inklusi keuangan dapat berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, Kementerian Keuangan memimpin penyusunan strategi ini dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan OJK. Bank Dunia menekankan pentingnya kebijakan yang dapat mendorong kemajuan di sektor keuangan di berbagai negara untuk mencapai inklusi keuangan. Tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi akan mempengaruhi cara masyarakat mengelola dan membuat keputusan terkait keuangan serta layanan keuangannya, yang pada akhirnya dapat mendukung kemajuan sektor keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini selaras dengan tujuan global Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dari inklusif, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak, pengurangan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan sosial.⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aktif dalam mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan berbagai kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang literasi keuangan yang sejalan dengan perluasan inklusi keuangan. Kurangnya pengetahuan dalam literasi keuangan dapat berpotensi menyebabkan individu terjebak dalam hutang, penggunaan kartu kredit yang tidak bijak, hingga menjadi korban investasi ilegal dan penipuan lainnya. Berdasarkan survei OJK, rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi lembaga keuangan dan ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Kemampuan finansial yang baik sangat penting agar seseorang dapat menikmati kesejahteraan. Semakin cepat seseorang memiliki kemampuan finansial yang tinggi, semakin besar peluang mereka untuk hidup sejahtera, sementara keterlambatan dalam hal ini dapat berujung pada kesulitan hidup. Kesejahteraan individu sangat erat kaitannya dengan literasi keuangan. Oleh karena itu, memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat menjadi bagian penting dari program literasi keuangan. Strategi nasional literasi keuangan mencakup 3 pilar utama, yaitu (1) pelaksanaan program edukasi dan kampanye literasi keuangan secara nasional; (2) penguatan infrastruktur literasi keuangan; dan (3) pengembangan produk serta layanan keuangan yang terjangkau. Ketiga pilar tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia, tingkat literasi keuangan masyarakat cenderung tinggi (lebih dari 40%), namun tingkat inklusinya relatif rendah. Kondisi ini sering

⁹ Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Anggota IKAPI 077/DIY/2012.

¹⁰ Hermawan, A., Minaryanti, A. A., Septiawan, B., Hadiyat, Y. R., & Noch, R. M. (2024). MENDORONG LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MASYARAKAT. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(3), 2735-2746.

terjadi pada mahasiswa dan profesional muda yang memiliki pemahaman tentang keuangan tetapi menghadapi keterbatasan akses ke produk keuangan formal akibat persyaratan yang ketat atau kurangnya riwayat kredit. Sebaliknya, di beberapa daerah yang menjadi sasaran program peningkatan akses keuangan, tingkat inklusi seringkali lebih tinggi dibandingkan literasinya. Sebagai contoh, program Laku Pandai berhasil meningkatkan jumlah kepemilikan rekening di pedesaan. Namun, survei OJK menunjukkan bahwa 40% pemilik rekening baru di wilayah ini memiliki pemahaman yang terbatas tentang produk keuangan yang mereka gunakan. Akibatnya, hal ini berpotensi mengurangi pemanfaatan layanan keuangan secara optimal atau bahkan meningkatkan risiko pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Literasi dan inklusi keuangan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Di Indonesia, peningkatan literasi keuangan telah membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Inklusi keuangan turut berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dengan memperluas basis nasabah bank. Data dari Bank Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan berhasil mengurangi volatilitas simpanan bank sebesar 15% dalam lima tahun terakhir. Diversifikasi basis nasabah ini mengurangi risiko terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank run) yang dapat mengancam stabilitas perbankan. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk keuangan formal, sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor keuangan informal yang tidak teregulasi. Hal ini mendukung efektivitas pengawasan dan regulasi oleh otoritas keuangan, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.¹¹

Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diadakan oleh OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai alat untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia, menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan cenderung lebih rendah dibanding wilayah perkotaan. Indeks literasi komposit di perkotaan sebesar 69,71% dan indeks literasi konvensional sebesar 69,61%, sedangkan indeks literasi komposit di pedesaan sebesar 59,25% dan indeks literasi konvensional sebesar 69,61%. Kemudian, untuk indeks inklusi komposit di perkotaan sebesar 78,41% dan indeks inklusi konvensional sebesar 77,21%, sedangkan indeks inklusi komposit di pedesaan sebesar 70,13% dan indeks inklusi konvensional sebesar 68,28%. Pada tahun 2024, SNLIK menggunakan parameter literasi keuangan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, indeks inklusi keuangan didasarkan pada parameter penggunaan (usage) produk dan layanan keuangan. Parameter ini selaras dengan indikator yang diterapkan dalam OECD/INFE International Survey of Financial Literacy. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perkotaan lebih mudah dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan. Dari hasil survei tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk serta layanan yang selaras dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen. Selain itu, hasil dari SNLIK 2024 juga diharapkan dapat sebagai bantuan dalam menganalisis dan meningkatkan

¹¹ Pane, S. G., Harahap, A. A., Daeli, I., Suganda, R. D., & Fazria, R. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Tabungan dan Investasi Masyarakat Dalam Sistem Keuangan Nasional. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 725-736.

literasi dan inklusi keuangan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan penduduk yang lebih merata pula.¹²

Kriteria individu yang memiliki literasi keuangan yang baik dapat dilihat dari lima parameter yaitu, perilaku, pengetahuan, keterampilan, sikap dan keyakinan. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik memiliki kemampuan untuk meningkatkan ketahanan uangnya. Sedangkan, individu dengan literasi keuangan rendah dalam pengambilan keputusannya cenderung mendapatkan hasil yang buruk dan berdampak dalam menimbulkan kondisi keuangan yang tidak diinginkan. Secara global, literasi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi berkelanjutan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, meningkatkan literasi keuangan menjadi hal yang krusial, karena dapat mempengaruhi masa depan sebuah negara

Rendahnya literasi keuangan tentu sangat memberikan dampak signifikan seperti masyarakat semakin kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan bahkan terjebak dalam skema-skema ilegal seperti pinjol, judi online, investasi legal, gadai legal hingga kejahatan siber lainnya. Menurut catatan OJK, dari tahun 2017 hingga 2023 tercatat total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai angka Rp139,67 triliun. Salah satu kasus nyatanya yaitu dugaan penipuan kredit yang terjadi di Kelurahan Gunung Sari dan Kelurahan Kampung Tempel Bandar Lampung pada bulan Juli 2024 lalu. Dari kejadian tersebut sebanyak 143 warga membuat aduan ke Kantor OJK Lampung sebab merasa telah ditipu oleh oknum petugas BRI. OJK pun kembali menekankan untuk menjaga data pribadi masing-masing dan tidak mudah disebar ke siapapun. Hal ini merupakan salah satu contoh dari dampak buruk yang terjadi akibat literasi keuangan yang rendah di wilayah pedesaan.¹³ Rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan di pedesaan disebabkan oleh beberapa hal yaitu, minimnya ketersediaan akses terhadap infrastruktur dan telekomunikasi, tingkat pendidikan formal yang relatif rendah, kurangnya program edukasi keuangan, budaya dan pola pikir yang kerap masih tradisional, serta kendala bahasa dan komunikasi sehingga sulit untuk memahami materi mengenai keuangan.¹⁴ Hal ini sangat disayangkan sebab dengan adanya kemajuan dari industri jasa keuangan belum dibarengi dengan adanya tingkat literasi keuangan masyarakat yang memadai terutama di wilayah pedesaan.

Di wilayah pedesaan yang terpencil, rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan pendidikan menjadi penghambat utama dalam memajukan ekonomi. Ketidakseimbangan akses terhadap informasi dan kemampuan finansial semakin memperbesar jurang antara daerah pedesaan dan perkotaan, menghalangi masyarakat untuk mengelola keuangan secara optimal dan mengambil peran aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterbatasan pendidikan di desa kerap menjadi penyebab utama rendahnya pemahaman finansial. Minimnya fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, dan kurangnya materi pembelajaran yang memadai menciptakan siklus kemiskinan dan keterbatasan pengetahuan. Akibatnya, banyak masyarakat desa tidak menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, yang merupakan pondasi untuk memahami konsep keuangan. Akses terhadap informasi keuangan di desa juga seringkali sangat

¹² Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Diakses pada 14 November 2024, dari [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)

¹³ Fernando, T. (2024). Mengawal Peningkatan Literasi Keuangan Hingga ke Pelosok Desa. Diakses pada 14 November 2024, dari <https://rilis.id/Ekonomi/Berita/Mengawal-Peningkatan-Literasi-Kuangan-Hingga-ke-Desa-RYLO5GB>

¹⁴ Trikarinaputri, E. (2024). Indeks Literasi Keuangan di Desa Rendah, Penyebab Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong Tumbuh Subur?. Diakses pada 14 November 2024, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/indeks-literasi-keuangan-keuangan-di-desa-rendah-penyebab-pinjol-ilegal-dan-investasi-bodong-tumbuh-subur--32070>

terbatas. Ketiadaan perpustakaan, akses internet, dan media massa membuat masyarakat desa terputus dari sumber pengetahuan yang dapat membantu mereka memahami pengelolaan keuangan. Kondisi ini menyulitkan mereka dalam mengambil keputusan keuangan yang bijak dan meningkatkan risiko terjebak dalam masalah seperti utang yang membebani. Selain itu, Budaya dan norma sosial turut berkontribusi terhadap rendahnya literasi keuangan di desa. Kebiasaan mengandalkan tradisi dan nilai-nilai lokal seringkali menghambat masyarakat dalam mencari informasi keuangan atau mempertanyakan praktik keuangan yang kurang menguntungkan. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya, prioritas lebih diberikan pada pengeluaran konsumtif daripada menabung atau berinvestasi, yang dapat menghambat pembangunan keuangan jangka panjang.¹⁵ Oleh karena itu, seperti yang telah diuraikan sebelumnya literasi keuangan yang rendah oleh masyarakat pedesaan sangatlah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa bahkan juga terhadap tingkat inklusi keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah pedesaan akan terus menerus ditimpa oleh kemiskinan dan ketimpangan.

Berdasarkan hal tersebut maka harus ada pendekatan yang holistik dan terintegrasi dengan diperlukannya peran OJK dan Bank serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendampingi masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, hal ini sesuai dengan regulasi yang telah ada yaitu diantaranya, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyebutkan bahwa OJK berperan dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen termasuk dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur mengenai kewajiban bank dalam mengedukasi nasabah sebagai wujud dari pelayanan keuangan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam proses program pembangunan termasuk di dalamnya meningkatkan literasi keuangan melalui BUMDes. Selain perundang-undangan juga terdapat Peraturan dari OJK salah satunya yaitu, POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.¹⁶

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di wilayah pedesaan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat lokal. Solusi pertama yang dapat diterapkan adalah dengan melaksanakan program edukasi keuangan yang berkelanjutan dan terstruktur. Pemerintah bersama lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan fintech bisa bekerja sama untuk mengadakan pelatihan dan seminar yang tidak hanya menjelaskan konsep-konsep keuangan dasar, seperti menabung, berinvestasi, atau mengelola utang, tetapi juga memperkenalkan produk-produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Program ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal dan menggunakan metode yang mudah dipahami, seperti contoh kasus praktis dan ilustrasi visual, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan istilah teknis dalam keuangan.¹⁷ Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi efektif untuk menjangkau masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal di wilayah terpencil. Pengenalan aplikasi keuangan yang user-friendly, seperti e-wallet atau platform investasi mikro, dapat membuka akses bagi mereka yang belum terjangkau oleh sistem

¹⁵ TimPanda. (2024). Keterbatasan Literasi Keuangan dan Pendidikan di Pedesaan. Diakses pada 14 November 2024, dari <https://www.panda.id/keterbatasan-literasi-keuangan-dan-pendidikan-di-desa/#:~:text=Kurangnya%20akses%20ke%20pendidikan%20formal,dan%20sarana%20belajar%20yang%20layak>.

¹⁶ Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., & Sholikhah, A. F. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro. *Kampelmas*, 1(2), 573-583.

¹⁷ SI, M. F., Yusnaldi, Y., & Irmalis, A. (2021). Strategi Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris Di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(2).

perbankan konvensional. Program pengenalan literasi keuangan digital dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan menggunakan perangkat mobile yang sudah mulai dikenal luas di desa, serta memperkenalkan berbagai layanan keuangan digital yang memudahkan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke bank. Di samping itu, penyuluhan mengenai pentingnya keamanan digital dalam melakukan transaksi juga harus menjadi bagian integral dari program ini, untuk menghindari potensi risiko penipuan atau penyalahgunaan data pribadi serta terlindungi dari kejahatan siber lainnya.¹⁸

Salah satu langkah penting yang juga harus dilakukan guna meningkatkan literasi keuangan di pedesaan adalah pembangunan infrastruktur. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses internet akan memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui berbagai sumber informasi keuangan yang berguna. Perpustakaan desa dan ruang publik lainnya dapat dilengkapi dengan buku dan materi edukasi tentang pengelolaan keuangan, baik secara cetak maupun digital. Selain itu, mendorong desa-desa untuk mendirikan pusat-pusat pendidikan atau pelatihan yang fokus pada literasi keuangan akan mempermudah warga untuk belajar tanpa harus bepergian jauh ke kota. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur ini akan sangat membantu mengatasi keterbatasan akses di daerah terpencil.¹⁹ Di samping adanya pendekatan edukasi dan teknologi, faktor sosial dan budaya juga harus diperhatikan. Di banyak desa, norma sosial dan kebiasaan budaya masih sangat mempengaruhi cara masyarakat mengelola keuangan. Oleh karena itu, melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin desa sebagai agen perubahan sangat penting dalam menyebarkan informasi keuangan yang benar. Mereka bisa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan konsep-konsep keuangan dengan nilai-nilai lokal, serta memberi contoh positif dalam mengelola keuangan secara bijak. Selain itu, penting untuk mengadaptasi materi edukasi keuangan dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat, menghindari pendekatan yang terlalu formal atau teknis yang mungkin tidak mudah dipahami oleh warga desa.²⁰

Dengan adanya peningkatan literasi keuangan seharusnya juga diselaraskan dengan adanya peningkatan akses terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif. Layanan keuangan yang berbasis pada teknologi, seperti agen bank, layanan uang elektronik, atau pembukaan rekening bank melalui ponsel, dapat mempermudah masyarakat pedesaan dalam mengakses produk keuangan. Dengan memperkenalkan konsep tabungan, investasi, dan pinjaman secara sederhana, masyarakat dapat mulai memahami bagaimana produk-produk ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Oleh karena itu, secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di wilayah pedesaan guna mendorong tingkat inklusi keuangan Indonesia semata-mata bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga keuangan, tetapi juga perlu adanya peran aktif masyarakat itu sendiri. Dengan pendekatan yang terintegrasi, mencakup edukasi, teknologi, budaya, dan akses ke layanan keuangan, literasi keuangan dapat menjadi kunci

¹⁸ Ritonga, M., Muti'ah, R., Bangun, B., Febrian, D., & Ritonga, SS (2023). Pelatihan UMKM sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat pedesaan. *Jurnal Aptekmas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (2), 14-21.

¹⁹ TimPanda. (2024). Meningkatkan Literasi Keuangan di Desa untuk Mendukung Akses Inklusif. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://www.panda.id/meningkatkan-literasi-keuangan-di-desa-untuk-mendukung-akses-inklusif/>

²⁰ Halawa, A., Harefa, I., Telaumbanua, A., & Bu'ulolo, N. A. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT DESA CARITAS SOGAWUNASI, KECAMATAN LOLOMATUA, KABUPATEN NIAS SELATAN. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 1677-1684.

untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendukung inklusi keuangan secara lebih luas.

KESIMPULAN

Peningkatan literasi keuangan sangat penting untuk membantu individu dan masyarakat mengelola keuangan dengan bijaksana, yang pada gilirannya mendukung kestabilan keuangan. Di Indonesia, meskipun tingkat literasi keuangan di perkotaan cukup tinggi, tingkat inklusinya masih tergolong rendah, sementara di pedesaan, meskipun inklusi keuangannya lebih tinggi, tingkat literasinya lebih terbatas. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan di pedesaan agar masyarakat dapat lebih memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara efektif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah aktif mengimplementasikan berbagai program edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada sektor keuangan informal serta memperkuat sistem keuangan nasional. Peningkatan literasi keuangan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan literasi keuangan di pedesaan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan edukasi, teknologi, pembangunan infrastruktur, serta pemahaman terhadap nilai sosial dan budaya lokal. Pendekatan ini akan membuka peluang ekonomi baru, mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dan memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., & Sholikha, A. F. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro. *Kampelmas*, 1(2), 573-583.
- Asir, M., Wahab, A., Firdaus, A., Suprpto, S., & Azizi, M. (2023). OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI FINANSIAL UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI PEDESAAN. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11633-11637.
- Halawa, A., Harefa, I., Telaumbanua, A., & Bu'ulolo, N. A. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT DESA CARITAS SOGAWUNASI, KECAMATAN LOLOMATUA, KABUPATEN NIAS SELATAN. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 1677-1684.
- Hermawan, A., Minaryanti, A. A., Septiawan, B., Hadiyat, Y. R., & Noch, R. M. (2024). MENDORONG LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MASYARAKAT. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(3), 2735-2746.
- Margaretha, F., & Pambudhi, R. A. (2015). Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S-1 fakultas ekonomi. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 17(1), 76-85.
- Nurjannah, S. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, SIKAP KEUANGAN DAN PERILAKU KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM DI JAKARTA BARAT: MODEL KONSEPTUAL.
- Pane, S. G., Harahap, A. A., Daeli, I., Suganda, R. D., & Fazria, R. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Tabungan dan Investasi Masyarakat Dalam Sistem Keuangan Nasional. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 725-736.

- Ritonga, M., Muti'ah, R., Bangun, B., Febrian, D., & Ritonga, SS (2023). Pelatihan UMKM sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat pedesaan. *Jurnal Aptekmas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (2), 14-21.
- Setyaningrat, D., Mushlihin, I. A., & Zunaidi, A. (2023). Strategi digitalisasi untuk mendorong inklusi keuangan nasabah bank syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 53-76.
- SI, M. F., Yusnaidi, Y., & Irmalis, A. (2021). Strategi Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris Di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(2).
- Sugiharti, H., & Maula, K. A. (2019). Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2).
- Wulandari, R. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Provinsi DKI Jakarta) (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta).

Buku Teks

- Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Anggota IKAPI 077/DIY/2012.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Fernando, T. (2024). Mengawal Peningkatan Literasi Keuangan Hingga ke Pelosok Desa. Diakses pada 14 November 2024, dari <https://rilis.id/Ekonomi/Berita/Mengawal-Peningkatan-Literasi-Kuangan-Hingga-ke-Desa-RYLO5GB>
- Trikarinaputri, E. (2024). Indeks Literasi Keuangan di Desa Rendah, Penyebab Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong Tumbuh Subur?. Diakses pada 14 November 2024, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/indeks-literasi-keuangan-keuangan-di-desa-rendah-penyebab-pinjol-ilegal-dan-investasi-bodong-tumbuh-subur--32070>

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Diakses pada 14 November 2024, dari [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- TimPanda. (2024). Keterbatasan Literasi Keuangan dan Pendidikan di Pedesaan. Diakses pada 14 November 2024, dari <https://www.panda.id/keterbatasan-literasi-keuangan-dan-pendidikan-di-desa/#:~:text=Kurangnya%20akses%20ke%20pendidikan%20formal,dan%20sarana%20belajar%20yang%20layak.>
- TimPanda. (2024). Meningkatkan Literasi Keuangan di Desa untuk Mendukung Akses Inklusif. Diakses pada 15 November 2024, dari <https://www.panda.id/meningkatkan-literasi-keuangan-di-desa-untuk-mendukung-akses-inklusif/>